

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mengartikan sampah sebagai benda yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Sejalan dengan KBBI, *Waste Management Law* dalam UU No. 137/1970 pada pasal 2 ayat (1), mendefinisikan sampah sebagai materi dalam wujud padat ataupun cair yang dibuang karena tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, *Waste Business Journal* (n.d.) menambahkan bahwa sampah yang berwujud cair umumnya disebut sebagai limbah, sedangkan sampah yang berwujud padat disebut sampah padat.

Terlepas dari wujudnya, secara umum, sampah itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu: sampah industri dan sampah umum. Sampah industri adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas produksi (Kawasaki 2005: 1). Sampah industri pun dibedakan lagi menjadi dua jenis yaitu: sampah industri terkontrol khusus dan sampah industri lainnya -termasuk di dalamnya limbah industri-. Sementara, semua sampah di luar kategori sampah industri disebut sebagai sampah umum, dan secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu: sampah umum terkontrol khusus, limbah umum dan tinja, dan sampah umum lainnya atau yang lebih dikenal dengan nama *Municipal Solid Waste* (NREL 1993: 44; Fujisōgōkenkyūjo 2001: 10; Kawasaki 2005: 1). Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis sampah dapat dilihat pada bab tiga, sementara pada bab ini hanya akan dijelaskan sedikit gambaran mengenai *Municipal Solid Waste* (MSW).

Municipal Solid Waste (MSW) atau “sampah padat perkotaan” adalah jenis sampah umum yang mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil, sampah di area-area umum, dan ada kalanya sampah hasil *treatment plant site* yang dikumpulkan oleh *municipality*¹ dalam wilayah tertentu (NREL 1993: 62). Dengan kata lain, MSW didominasi oleh sampah rumah tangga, yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan sampah dari badan komersil, area umum, maupun *treatment plant site*.

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian, maka skripsi ini hanya akan memfokuskan pembahasan pada lingkup *Municipal Solid Waste* (MSW) atau “sampah padat perkotaan,” khususnya sampah rumah tangga. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa sampah rumah tangga merupakan sampah yang paling mendominasi di daerah perkotaan, dan dinilai sebagai masalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia, karena hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh ayah, ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya dalam sebuah rumah tangga setiap harinya berpeluang menghasilkan sampah-sampah baru. Dengan demikian, sampah rumah tangga dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang cukup penting untuk dikaji lebih dalam lagi.

Berbicara mengenai timbunan sampah perkotaan di suatu negara, pastinya tidak terlepas dari tiga faktor utama yang mempengaruhi yaitu: tingkat konsumsi, tingkat pendapatan, dan kepadatan penduduk di daerah perkotaan (World Bank 1999: 5). Tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbunan sampah pada suatu wilayah atau negara (Pramono 2004: 3). Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersiernya. Hal ini, pada akhirnya, merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya (Wardhani 2007: 57).

¹ *Municipality* adalah kesatuan administratif yang secara jelas didefinisikan sebagai teritorial, dan pada umumnya merupakan sebuah kota besar, kota kecil, desa, atau yang lebih kecil dari wilayah tersebut. *Municipality* umumnya diperintah oleh walikota atau dewan kota, atau disebut juga sebagai pemerintahan setingkat kotamadya, dapat juga disebut sebagai pemerintah lokal atau pemerintah daerah setempat. Di Jepang, *municipality* merupakan bagian dari prefektur, dan *municipality* umumnya terdiri dari beberapa distrik atau bahkan banyak distrik.

Dengan begitu, dapat kita pahami bahwa pada zaman yang modern ini, sampah yang dihasilkan semakin hari semakin bervariasi jenis dan bertambah jumlahnya.

Selain itu, tingkat pendapatan nasional dan kepadatan penduduk di daerah perkotaan turut dinilai sebagai faktor yang menentukan rata-rata tingkat timbunan sampah pada suatu negara. Umumnya, semakin makmur suatu negara, semakin tinggi persentase populasi penduduk di daerah perkotaan, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan (World Bank 1999: 5), hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Rata-Rata Sampah di Kawasan Asia (1995)

Negara	GNI per kapita ¹ 1995 (US\$)	Populasi Penduduk ² 1995		Sampah Padat Perkotaan (MSW)	
		Total Populasi	Urban (% dari Total)	Rata-Rata (kg/kapita/hari)	Total Sampah (ton/hari)
Pendapatan Kecil					
Nepal	200	21.500.000	13,7	0,5	1.473
Bangladesh	240	119.800.000	18,3	0,49	10.742
Myanmar	240	46.500.000	26,2	0,45	5.482
Vietnam	240	73.500.000	20,8	0,55	8.408
Mongolia	310	2.500.000	60,9	0,6	914
India	340	929.400.000	26,8	0,46	114.576
China	620	1.200.200.000	30,3	0,79	287.292
Sri Langka	700	18.100.000	22,4	0,89	3.608
Pendapatan Sedang					
Indonesia	980	193.300.000	35,4	0,76	52.005
Filipina	1050	68.600.000	54,2	0,52	19.334
Malaysia	3890	20.100.000	53,7	0,81	8.743
Pendapatan Tinggi					
Singapura	26.730	3.000.000	100	1,1	3.300
Jepang	39.640	125.200.000	77,6	1,47	142.818
Keterangan					
1. World Bank, 1997.					
2. United Nations, 1995.					

Sumber: World Bank (1999), hlm. 42, telah diolah kembali.

Dari tabel, dapat diketahui bahwa Jepang mempunyai tingkat pendapatan nasional perkapita tertinggi pada tahun 1995, khususnya untuk kawasan Asia, yaitu sebesar 39.640 US\$, dan tertinggi kedua di kawasan dunia setelah Amerika

Serikat (Karpel, 2006). Sebagai salah satu negara di Asia, Jepang termasuk dalam kategori negara yang sangat produktif dalam memproduksi sampah. Rata-rata sampah padat perkotaan yang dihasilkan oleh Jepang saja pada tahun 1995 adalah sebesar 1,47 kg/kapita/hari, jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yang notabene kebanyakan jumlah sampahnya tidak sampai 1 kg/kapita/hari.

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, prestasi Jepang dalam menghasilkan sejumlah sampah tidak dapat dipandang remeh. Berdasarkan data dalam World Bank (1999), diketahui bahwa yang menempati posisi pertama produksi sampah di dunia pada tahun 1995 adalah Amerika Serikat dengan rata-rata 2 kg/kapita/hari, disusul Australia dengan 1,89 kg/kapita/harinya pada posisi kedua, kemudian diikuti oleh Kanada dengan 1,8 kg/kapita/hari di posisi ketiga, lalu posisi keempat Finlandia dengan 1,7 kg/kapita/hari, Islandia dengan 1,53 kg/kapita/hari di posisi kelima, sampai akhirnya Jepang tampil di posisi keenam mewakili wilayah Asia dengan 1,47 kg/kapita/hari mengalahkan negara-negara maju lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Jepang yang termasuk dalam kategori negara dengan populasi sangat padat dan kebanyakan kegiatan industri serta populasinya terpusat di kota, dikatakan mempunyai rata-rata sampah padat perkotaan yang tinggi. Jika ditelusuri melalui sejarahnya, dapat diketahui bahwa penyebab tingginya angka rata-rata sampah padat perkotaan (kg/kapita/hari) yang dihasilkan di Jepang adalah karena dulu Jepang pernah mengalami suatu periode panjang dalam pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada produksi massal, konsumsi massal, dan pembuangan massal (METI, 2006). Konsekuensinya adalah saat ini Jepang tengah menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang menekan, seperti kekurangan lahan untuk penimbunan sampah, dan ancaman kehabisan sumber daya alam untuk masa yang akan datang (Kawasaki 2005: 2). Belum lagi, kesulitan memperoleh tanah yang sesuai untuk lokasi pembuangan akhir semakin meningkat setiap tahun (Tanaka 1999: 11).

Berangkat dari kondisi yang demikian, pemilihan Jepang sebagai studi kasus dalam skripsi ini didasari oleh dua pertimbangan yakni: *Pertama*, Jepang

mempunyai rata-rata produksi sampah tertinggi, khususnya di wilayah Asia, dan mempunyai peringkat produksi sampah yang tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya di dunia pada umumnya. *Kedua*, penulis menyadari bahwa ada suatu persoalan menarik mengenai sampah di Jepang, dimana Jepang disebut-sebut tengah menghadapi persoalan ganda yaitu: di satu sisi, Jepang sangat produktif dalam menghasilkan sejumlah sampah, namun pada sisi lain dapat dilihat bahwa Jepang mengalami berbagai persoalan yang menekan seperti: kekurangan lahan untuk penimbunan sampah, kesulitan memperoleh lahan untuk pembuangan akhir, dan ancaman akan kehabisan sumber daya alam untuk masa yang akan datang.

Semua persoalan ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang. Untuk dapat mempertahankan pembangunan negara di masa depan, maka pemerintah Jepang berusaha memfokuskan perhatiannya pada persoalan sampah. Dari pada memandang persoalan itu sebagai faktor yang menekan pertumbuhan ekonominya, dikatakan dalam METI (2006) bahwa Jepang lebih memilih jalan proaktif dalam menangani persolannya. Dengan berlandaskan pada kerangka hukumnya, seperti: *Waste Management Law* pada tahun 1970; *Law for Promotion of Utilization of Recycled Resources* pada tahun 1991; *Containers and Packaging Recycling Law* pada tahun 1995; *Home Appliance Recycling Law* pada tahun 1998; *Foundation Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society*, *Law for Promotion of Effective Utilization of Resources*, *Green Purchasing Law*, dan *Food Recycling Law* pada tahun 2000 (MOE, 2003); pemerintah Jepang berusaha secara aktif mengajak seluruh elemen masyarakat -produsen, konsumen, dan *municipality*- untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Jepang.

Berkenaan dengan hukum-hukum diatas, dapat dipahami bahwa gerakan 3R tengah menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan sampah di Jepang. Gerakan 3R yang dimaksud itu adalah gerakan mereduksi jumlah sampah yang dihasilkan 'Reduce', gerakan memanfaatkan kembali komponen sampah yang masih dapat digunakan 'Reuse', dan gerakan daur-ulang produk bekas pakai sebagai sumber daya baru 'Recycle' (MOE, 2003). Penekanan pada gerakan 3R dalam mengelola sampah menjadi barang bermanfaat telah dijadikan orientasi utama di Jepang, karena di samping dapat mengurangi beban pada tempat pembuangan akhir, juga

dapat mengurangi konsumsi akan sumber daya alam, dan meringankan beban pada lingkungan (Kawasaki 2005: 2).

Berpijak pada kondisi tersebut, skripsi ini menganalisis gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens (1984).

Penggunaan teori strukturasi dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, teori strukturasi Giddens tidak hanya berbicara di dalam tataran konseptual saja, tetapi juga mampu diterapkan dalam penelitian sosial dan berkaitan langsung dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya, fenomena gerakan 3R dalam pengelolaan sampah juga merupakan sebuah fenomena umum dan universal yang eksis di masyarakat, sehingga pemakaian teori itu dianggap relevan dengan kajian dalam skripsi ini. *Kedua*, menurut hemat saya, teori strukturasi jauh lebih berhasil dalam menjembatani kesenjangan, ketegangan, dan kaitan antara apa yang dalam “republik teori ilmu sosial” disebut analisis pada dataran agen dan tataran struktur. Oleh sebab itu, teori strukturasi dianggap mampu menjelaskan masalah penelitian yang memang menyangkut analisis pada lingkup agen dan struktur. *Ketiga*, didasarkan pada pertimbangan bahwa teori strukturasi lebih relevan jika diterapkan dalam masyarakat yang karakteristiknya sudah digolongkan sebagai masyarakat yang rasional, maka seyogyanya penggunaan teori ini dianggap sejalan dengan masalah penelitian yang mengambil studi kasus Jepang, yang notabene masyarakatnya sudah rasional.

Dalam teori strukturasi, Anthony Giddens (1984) mengemukakan bahwa relasi antara agen dan struktur pada dasarnya harus dilihat sebagai relasi “dualitas struktur,” dimana terjadi hubungan koheren didalamnya yakni: struktur bertindak sebagai medium bagi agen dalam melakukan praktik sosial, dan sekaligus hasil dari perulangan praktik sosial yang dilakukan oleh agen. Dapat dipahami bahwa di satu sisi ada agen yang melakukan praktik sosial dalam konteks tertentu, dan di sisi lainnya ada aturan dan sumber daya yang memediasi praktik sosial tersebut, sehingga pada gilirannya, melalui praktik sosial tersebut akan terbentuk struktur baru yang selanjutnya akan mengorganisir kembali praktik sosial yang dilakukan

oleh agen. Dengan begitu, jelas terlihat bahwa praktik sosial menurut Giddens adalah praktik sosial yang mengintegrasikan agen dan struktur.

Seperti halnya di Jepang, adanya pembagian peran yang jelas antara *stakeholder* -para pemangku kepentingan- dalam pelaksanaan gerakan 3R di Jepang, yang tertuang dalam kerangka hukum sampah di Jepang, menyiratkan makna bahwa struktur manajemen sampah di Jepang mempunyai porsi yang besar dalam melibatkan agen individu maupun kelompok untuk turut membantu dan menyukseskan dalam pengelolaan sampah di Jepang. Dengan demikian, relasi antara agen dan struktur dalam pelaksanaan gerakan 3R di Jepang dilihat sebagai satu-kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lugasnya, eksistensi dari struktur manajemen sampah di Jepang tak terlepas dari kehadiran agen dalam pengelolaan sampah, begitu juga sebaliknya, sehingga dapat dilihat ada interaksi yang terjadi didalamnya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut, maka berikut ini akan diperkenalkan gambaran umum mengenai pengelolaan sampah di Jepang. Karena lingkup sampah yang dibahas pada skripsi ini adalah *Municipal Solid Waste* (MSW), maka pengelolaan sampah yang dimaksud adalah *Municipal Solid Waste Management* (MSWM).

Wanless (2008) menjelaskan bahwa *Municipal Solid Waste Management* adalah tata cara pengaturan aliran sampah padat dalam kota -umumnya terdiri dari beberapa tahap yaitu: pemisahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan pembuangan akhir- yang bertujuan mereduksi dampak yang ditimbulkan oleh sampah pada kesehatan masyarakat, lingkungan, ataupun yang dapat merusak keindahan. MSWM di Jepang sangat jelas menggabungkan *waste reduction*, *reuse* dan *recycling* sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari tahap-tahap pengelolaan sampah secara keseluruhan (Japan Institute of Infra-Structure 1982: 1).

Tahap yang paling menonjol dalam pengelolaan sampah di Jepang adalah pemisahan sampah menurut jenisnya sebelum dibuang. Jepang membedakan sampahnya dalam beberapa kategori, dan kategori pemisahan ini dapat berbeda

pada setiap kota ataupun setiap distrik, sebab sangat tergantung pada kebijakan *municipality*-nya (Yasuda dalam Wardhani 2007: 62). Memang benar jika dikatakan bahwa membuang sampah di Jepang sangatlah merepotkan, selain harus memisahkannya lebih dahulu, kita harus membuangnya pada hari yang ditentukan pula. Hal ini sangatlah wajar bagi kita yang belum terbiasa dengan hal tersebut, namun bagi orang Jepang yang setiap harinya sudah melakukan hal yang sama berulang-kali, maka sudah menjadi rutinitas yang dilakukan terus-menerus tanpa berpikir bahwa hal itu merepotkan, karena intinya adalah masalah kebiasaan dan kesadaran dari masing-masing warga. Cara penanganan sampah yang seperti ini berjalan lancar dan sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari orang Jepang.

Terkait dengan praktik pemisahan sampah diatas, masyarakat kemudian berpikir bagaimana caranya membuat sampah-sampah itu menjadi lebih bernilai ekonomis atau berguna lagi, sehingga timbul kesadaran dari dalam diri individu-individu itu sendiri untuk melakukan 3R, gerakan 3R ini tidak serta merta muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya interaksi dengan aturan pengelolaan sampah setelah sekian lama. Kemudian, dengan dimediasi oleh aturan-aturan yang ada, masyarakat bergerak dengan kesadaran sendiri yang tak dipaksakan, terus mendukung, mempromosikan, dan mempraktikkan gerakan 3R dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan begitu, jelas kelihatan bahwa masyarakat Jepang sebagai agen merespon positif terhadap struktur manajemen sampah yang ada. Dengan kata lain, kesuksesan Jepang dalam menjalankan pengelolaan sampah, bukan sepenuhnya merupakan upaya pemerintah saja, namun juga merupakan hasil interaksi antara struktur manajemen sampah dengan keseluruhan agen-agen dalam masyarakat Jepang.

Pemilihan masalah tentang gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai bahan kajian skripsi ini, didasari atas pertimbangan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang dicap sukses dalam menangani masalah sampah melalui gerakan 3R-nya yang begitu kuat. Kedua, pertimbangan dalam pemilihan tema ini juga dipengaruhi oleh pandangan penulis yang dibentuk oleh media massa bahwasanya Jepang dikatakan sebagai satu sosok negara yang bersih, menuai tanda tanya dalam pikiran penulis, “upaya seperti apa yang dilakukan oleh

Jepang untuk menjadi salah satu negara yang dikenal bersih oleh masyarakat dunia?” sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang gerakan 3R yang sering disebut-sebut sebagai dalang utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jepang.

Berpijak pada alasan diatas, penelitian mengenai masalah gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang diharapkan sejalan dengan tujuan penulis yang ingin memberikan sumbangsih pengetahuan yang cukup berarti bagi perkembangan studi manajemen sampah di Indonesia, dengan demikian skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai masyarakat dan kebudayaan Jepang.

1.2. Perumusan Masalah

Sampah merupakan persoalan umum yang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia manapun, begitu juga halnya di Jepang. Dalam kawasan Asia dan dunia, dapat dilihat bahwa Jepang termasuk dalam kategori negara yang produktif dalam menghasilkan sejumlah sampah. Walaupun demikian, masyarakat dunia juga mengetahui bahwa Jepang adalah salah satu dari negara yang dicap sukses dalam menangani masalah sampah.

Berawal dari pertanyaan, “mengapa Jepang dengan lahan yang terbatas dapat mengatasi persoalan sampahnya?” kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “upaya apa yang dilakukan oleh Jepang dalam mengurangi sampahnya?” dan yang terakhir “faktor apa yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Jepang sehingga jumlah sampahnya dapat dikurangi secara signifikan?” Dari indikasi tersebut, penulis melihat bahwa ada sesuatu hal dibalik pengelolaan sampahnya yang membuat Jepang berhasil dalam mengurangi jumlah sampahnya, “apakah yang dimaksud itu adalah gerakan 3R yang sering disebut-sebut sebagai dalang utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Jepang?” Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk lebih jauh membahas gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang.

Berangkat dari teori strukturasi Giddens (1984), yang menyatakan bahwa relasi antara agen dan struktur pada dasarnya harus dilihat sebagai relasi “dualitas struktur,” dimana terjadi hubungan koheren didalamnya yakni: struktur bertindak sebagai medium bagi agen dalam melakukan praktik sosial, dan sekaligus hasil perulangan praktik sosial yang dilakukan oleh agen. Dengan kata lain, agen dan struktur hanya terwujud dalam praktik sosial, sehingga keduanya dapat dilihat dalam praktik sosial, dan hanya dapat dibedakan secara analitis, maka studi ini akan menganalisis tentang interaksi yang terjadi antara struktur manajemen sampah dengan agen pengelolaan sampah di Jepang, dalam rangka membuktikan bahwa gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang adalah benar praktik sosial yang mengintegrasikan agen dan struktur.

Dengan demikian, masalah penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens (1984).

1.3. Tujuan Penulisan

Terkait dengan masalah penelitian yang diajukan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens (1984).

1.4. Signifikansi Penelitian

Dari segi akademis, hasil penelitian ini dimaksudkan, *pertama* untuk memperkenalkan praktik pengelolaan sampah yang berlaku di Jepang sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan bahan pembelajaran yang cukup berarti bagi studi-studi yang mempelajari tentang pengelolaan sampah di Indonesia. *Kedua*, skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi kajian ilmiah untuk memperluas studi tentang masyarakat Jepang. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan kita mengenai masyarakat dan kebudayaan Jepang.

Dari segi sosial, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat timbul suatu perubahan cara berpikir, sikap, dan pengetahuan masyarakat Indonesia dalam memandang sampah dan pengelolaannya, sehingga dapat mengarahkan masyarakat kita pada jalan keluar atas permasalahan sampah yang ada selama ini di Indonesia.

Dari segi praktis, melalui informasi dan jawaban atas masalah penelitian yang dipaparkan dalam penelitian ini, dengan Jepang sebagai contoh penelitian, maka diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, pada penerapan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Diharapkan juga dengan menerapkan cara-cara yang serupa, maka Indonesia dapat memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik, dan yang dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang ada.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian, maka skripsi ini hanya akan memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang pada lingkup *Municipal Solid Waste (MSW)* atau “sampah padat perkotaan,” khususnya sampah rumah tangga.

1.6. Landasan Teori

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, mengacu pada teori strukturasi, yang dikemukakan oleh Anthony Giddens (1984). Dengan dasar pertimbangan, teori strukturasi Giddens relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial yang mengintegrasikan agen dan struktur.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada penjelasan dan uraian argumentatif. Pembahasan dalam skripsi ini menekankan pada deskripsi mengenai gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial yang ditinjau dari teori strukturasi Giddens (1984). Dengan kata lain, penelitian ini dilihat sebagai kajian yang menekankan pada pendekatan sosiologis, bukan sebagai kajian yang berada dalam lingkup teknologi lingkungan.

Sedangkan, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelaahan kepustakaan. Bahan bacaan yang digunakan meliputi buku-buku teks, jurnal, artikel dalam majalah, dan publikasi elektronik. Adapun bahan bacaan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan The Japan Foundation, bapak dan ibu dosen, teman, internet, koleksi pribadi, dan seminar yang pernah diikuti.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini hanya merupakan sketsa kecil yang mencoba memetakan suatu masalah tentang gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasinya Giddens (1984). Adapun demikian, skripsi ini disusun dalam lima bab dengan urutan pembahasan yaitu: satu bab pendahuluan, satu bab kerangka teori, satu bab tinjauan pustaka, satu bab analisis, dan terakhir satu bab penutup.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang disusun sedemikian rupa untuk memberikan gambaran umum atas penelitian ini, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, batasan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bagian kerangka teori yang membahas pendekatan teoritis mengenai praktik sosial menurut teori strukturasi Anthony Giddens (1984). Pada bab ini juga dikemukakan mengenai integrasi agen-struktur, serta beberapa konsep terkait masalah penelitian yaitu: konsep agen, konsep agensi, konsep struktur, konsep strukturasi, konsep praktik sosial, dan konsep ruang-waktu, dan penutup.

Bab tiga merupakan bagian yang menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pengelolaan sampah di Jepang, dan terdiri dari dua bagian utama yaitu: gambaran umum sampah di Jepang dan pengelolaan sampah di Jepang. Gambaran umum sampah di Jepang akan diawali dengan definisi sampah, kemudian diikuti oleh jenis sampah di Jepang, sumber sampah di Jepang, dan jumlah sampah di Jepang. Sementara, pengelolaan sampah di Jepang dijelaskan melalui tahapan berikut yaitu: pemisahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan pembuangan akhir sampah di Jepang.

Bab empat merupakan bab analisis. Pada bab ini akan dikemukakan analisis tentang gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasi, yang dikemukakan oleh Anthony Giddens (1984). Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai gerakan 3R di Jepang, karakteristik agen dan struktur manajemen sampah di Jepang, dan integrasi agen-struktur dalam pelaksanaan gerakan 3R di Jepang, yang terbagi menjadi tiga yaitu: dalam konteks *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas keseluruhan skripsi ini, yang kemudian akan ditutup oleh daftar referensi.